

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2017



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, atau disebut juga Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), yang juga merupakan perjalanan tahun ketiga dari Renstra Tahun 2015-2019.

Penyusunan LAKIP ini menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2013 tentang Prosedur Perencanaan Dan Penganggaran; serta Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Badan Pengusahaan Batam juga menguraikan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan juga merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan/atau beberapa kinerja yang belum tercapai secara maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Substansi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai instrumen untuk menginformasikan pencapaian kinerja Badan Pengusahaan Batam dalam tahun 2017 yang menyangkut tentang proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2017, yang sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja Badan Pengusahaan Batam merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 Badan Pengusahaan Batam ini kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, dan transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja Badan Pengusahaan Batam dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2017.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya LAKIP tahun 2017 ini, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja Badan Pengusahaan Batam di masa yang akan datang.

Kami menyadari dalam pembuatan dan/atau penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 ini masih ada beberapa kesalahan dan kekurangan yang akan kami perbaiki dengan komitmen penuh dari seluruh *stakeholders* dan komponen yang ada di Badan Pengusahaan Batam.

Batam, 27 Februari 2018

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan  
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan  
Bebas Batam



Lukita Dinarsyah Tuwo 

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2017 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang telah direncanakan.

Capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan.

Pengukuran indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Beberapa capaian utama kinerja tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama BP Batam	Target 2017	Realisasi 2017	%
Menjadikan Batam sebagai Kawasan Investasi yang Berdaya Saing di Asia Tenggara	1 Memantapkan pengelolaan kawasan investasi yang profesional	1 Meningkatkan peran kelembagaanyang profesional dalam mengantisipasi persaingan ekonomi dan perdagangan global.	1.1 Terwujudnya aturan dan regulasi yang berpihak pada pengembangan investasi.	1.1.1 Presentase jaminan kepastian hukum dalam berinvestasi di KPBPB Batam	40	32	80%
			1.2 Terwujudnya profesionalitas dalam manajemen pengelolaan yang menerapkan prinsip <i>good governance</i> dan <i>good corporate governance</i>	1.2.1 Tersusunnya <i>road map</i> reformasi birokrasi di KPBPB Batam.	100%	50	50%
				1.2.2 Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam.	100%	100%	100%
	2 Mewujudkan kawasan investasi yang memiliki infrastruktur yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	2 Menjaring dan mengembangkan kawasan investasi dalam sektor industri, perdagangan dan pariwisata yang berbasis Teknologi, Informatika dan Komunikasi (TIK).	2.1 Tercapainya target realisasi nilai investasi dari 8 fokus industri	2.1.1 Nilai investasi real di 8 fokus industri yang dikembangkan KPBPB Batam tercapai sejumlah 2,9 Milyar USD di tahun 2019	USD 558.001.149	USD 1.116.895.000	200,16%
				2.1.2 Waktu pelayanan perijinan investasi 15 hari	4 hari	3 hari (IP)	125%
		3 Mengembangkan sarana prasarana kepelabuhanan yang berstandar internasional	3.1 Tersedianya sarana prasarana kepelabuhanan yang menghubungkan simpul jasa kawasan investasi yang berstandar internasional	3.1.1 Target pendapatan pelabuhan laut tercapai Rp1,6 Trilyun di tahun 2019	Rp400.000.000.000	Rp397.966.466.740,21	99,49%
				3.1.2 Waktu pelayanan bongkar muat barang dan kontainer pelabuhan laut max 7 hari.	4 hari	2 hari	150%
				3.1.3 Target pendapatan bandara tercapai Rp1,1 Trilyun di tahun 2019	Rp220.889.468.429	Rp236.963.120.913	107,28%
				3.1.4 Waktu pelayanan bongkar muat barang kontainer dan kargo bandara Hang Nadim max 45 menit	30 menit	30 menit	100%

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama BP Batam	Target 2017	Realisasi 2017	%
	3 Mewujudkan kawasan investasi yang berwawasan lingkungan	4 Mengembangkan pengelolaan lingkungan hidup dikawasan-kawasan investasi yang berwawasan lingkungan	4.1 Terciptanya kawasan investasi yang sehat dan berwawasan lingkungan	4.1.1 Target pendapatan Rumah Sakit tercapai Rp887 milyar di tahun 2019	Rp96.217.000.000	Rp65.144.167.896	67,71%
				4.1.2 Target pendapatan Kantor Air tercapai Rp365 milyar di 2019	Rp33.009.865.922	Rp28.222.663.926	85,5%
				4.1.3 Terjaganya kualitas udara dan air yang baik	Minimal Class 3 (Skala 1-4)	Class 3	100%
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>							<b>105,43%</b>

Tabel AluriVisi – Misi – Realisasi2017

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tahun 2017 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 12 indikator kinerja utama, dengan capaian sasaran sebesar **105,43%**.

Kategori pencapaian sasaran tahun 2017 cukup sesuai dengan yang diharapkan; namun ada beberapa kendala yang mempengaruhi/menghambat pencapaian sasaran, antara lain

- a. Hambatan eksternal yang dominan dan sangat mempengaruhi capaian kinerja sesuai yang telah direncanakan, misalnya
  1. Peraturan Pemerintah tentang pembagian peran/kewenangan yang jelas antara BP Batam dengan Kementerian Perhubungan di dalam mengelola dan penyelenggaraan kepelabuhanan saat ini masih dalam proses;
  2. Masih kurang optimalnya koordinasi antarlembaga.
- b. Hambatan internal yang cukup mempengaruhi capaian kinerja adalah sebaran sumber daya manusia yang belum optimal.

Berbagai permasalahan atau kendala tersebut di atas diusahakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi agar tidak menghambat pencapaian sasaran, yaitu dengan melakukan

- a. Penyelesaian peraturan dan ketentuan operasional dalam rangka pelaksanaan tugas BP Batam;
- b. Tata kelola kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam sebaran yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
- c. Optimalisasi pemanfaatan aset dan sarana lainnya agar dapat memperoleh sumber pendapatan baru;
- d. Perlunya inovasi dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan visi dan misi BP Batam.

Untuk masa mendatang, hasil evaluasi dan analisis di atas akan dijadikan masukan guna pencapaian sasaran sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan telah disajikan dengan berbagai pertimbangan. Prinsip-prinsip penyusunan laporan yang baik mungkin saja belum semua dapat diterapkan pada Laporan Kinerja ini. Namun demikian, kami terus berupaya agar laporan ini dapat memenuhi tujuan penyusunnya.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum.....	1
B. Isu Strategis Badan Pengusahaan Batam .....	2
C. Kedudukan Badan Pengusahaan Batam .....	4
D. Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
E. Struktur Organisasi .....	8
F. Organisasi Pembina dan Asistensi .....	8
G. Lingkungan Strategis yang Bepengaruh .....	10
<b>BAB II</b>	
<b>PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>12</b>
A. Rencana Strategis.....	12
A.1. Visi.....	13
A.2. Misi.....	14
A.3. Tujuan .....	16
A.4. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama.....	16
A.5. Strategi dan Arah Kebijakan .....	21
A.6. Program .....	25
A.5. Rencana Kinerja .....	26
B. Perjanjian Kinerja.....	33
<b>BAB III</b>	
<b>AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>34</b>
A. Pengukuran Kinerja: Capaian Indikator Kinerja Utama.....	34
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	34
C. Akuntabilitas Keuangan.....	41
<b>BAB IV</b>	
<b>PENUTUP .....</b>	<b>44</b>
A. Kesimpulan .....	44
B. Saran.....	44

## DAFTAR GRAFIK DAN TABEL

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BP Batam.....	8
Gambar 1.2. Analisis SWOT .....	11
Tabel 2.1. Uraian Keterkaitan Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja BP Batam .....	19
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Sasaran Srategis.....	21
Tabel 2.3. Alur Visi – Misi – Realisasi 2017 .....	25
Gambar 2.1. grafik realisasi Anggaran 2017 .....	26
Tabel 2.4. Hubungan Kegiatan Terhadap IKU .....	33
Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .....	35
Tabel 3.1. Indikator Kinerja Sasaran Ke-1 .....	36
Tabel 3.2. Indikator Kinerja Sasaran ke-2.....	36
Tabel 3.3. Indikator Kinerja Sasaran ke-3.....	37
Tabel 3.4. Indikator Kinerja Sasaran ke-4.....	38
Tabel 3.5. Indikator Kinerja Sasaran Ke-5 .....	39
Tabel 3.6. Perbandingan Kinerja 2016-2017 .....	41
Tabel 3.7. Realisasi PNBPN 2017 .....	42
Tabel 3.8. Realisasi PNBPN 2016 .....	42
Tabel 3.9. Realisasi Penyerapan Anggaran 2017.....	43

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum

Pulau Batam merupakan salah satu pulau di antara 329 pulau dalam gugusan Kepulauan Riau, yang terletak antara Selat Malaka dan Singapura. Langkanya catatan tertulis dari pulau ini, maka hanya ada satu literatur yang menyebut nama Batam, yaitu Traktat London yang mengatur pembagian wilayah kekuasaan antara Belanda dan Inggris. Namun, menurut para pesiar dari China, pulau ini sudah dihuni sejak 231 M ketika Singapura masih disebut Pulau Ujung.

Sebelum mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, Batam merupakan sebuah pulau kosong berupa hutan belantara yang nyaris tanpa denyut kehidupan. Namun, terdapat beberapa kelompok penduduk yang lebih dahulu mendiami pulau ini. Mereka berprofesi sebagai penangkap ikan dan bercocok tanam. Mereka sama sekali tidak banyak terlibat dalam mengubah bentuk fisik pulau ini yang merupakan hamparan hutan belantara.

Pada tahun 1970-an, Pulau Batam mulai dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973, pembangunan Batam dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) atau disingkat dengan Otorita Batam. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam disebutkan bahwa Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berubah menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam dengan keberadaannya selama 70 tahun sejak PP 46 tersebut ditandatangani atau diberlakukan.

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi untuk mengembangkan Pulau Batam, maka dibangun berbagai infrastruktur modern yang berstandar internasional, serta berbagai fasilitas lainnya, sehingga diharapkan mampu bersaing dengan kawasan serupa di Asia Pasifik.

Berbagai kemajuan telah banyak dicapai selama ini, seperti tersedianya berbagai lapangan usaha, khususnya penanaman modal asing dari berbagai negara, yang mampu menampung tenaga kerja yang berasal hampir dari seluruh daerah di tanah air. Begitu juga dengan jumlah penerimaan daerah maupun pusat dari waktu ke waktu terus meningkat. Hal ini tidak lain karena semakin tumbuhnya kegiatan industri, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata. Namun, sebagai daerah yang berkembang pesat, Batam juga tidak luput dari

masalah. Untuk itulah, dilakukan penyempurnaan pengembangan Pulau Batam agar dapat melengkapinya kekurangan-kekurangan yang ada.

## **B. Isu Strategis Badan Pengusahaan Batam**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah atau masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian, kebijakan institusi tidak lagi bersifat reaktif, tetapi lebih antisipatif. Tanpa itu, akan banyak peluang-peluang penting akan hilang, dengan ancaman tidak dikenali atau terlambat diantisipasi.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu strategis adalah telaahan terhadap visi, misi dan program organisasi agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kinerja organisasi, serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Isu strategis juga merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka Badan Pengusahaan Batam akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Untuk mendukung instrumen kebijakan dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang berdaya saing untuk meningkatkan nilai investasi adalah pengaturan dalam pelayanan, khususnya yang di bawah naungan pengelolaan BP Batam.

Beberapa aspirasi dari masyarakat (*stakeholders*) yang dianggap mampu menjadi daya ungkit Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yaitu

1. Pelayanan perijinan terpadu dalam satu tempat bernama Mall Pelayanan Publik sebagai wujud penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat dan akurat;
2. BP Batam sebagai pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam diharapkan segera mengoptimalkan fungsi kepelabuhanan untuk pemanfaatan kapasitas yang tersedia;

3. Kebijakan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mendukung iklim investasi dan daya dukung kehidupan masyarakat;
4. Profesionalisme pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (*stake holder*) yang berlandaskan atas prinsip efektif, efisien dan transparan.

Sedangkan beberapa isu strategis Badan Pengusahaan Batam yang perlu diatasi dalam pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, antara lain

- 1) Peraturan Perundangan UU 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang belum dilengkapi dengan peraturan teknis yang mengatur secara lebih rinci ketentuan-ketentuan dalam UU tersebut.

Hal-hal yang perlu dirumuskan dalam peraturan teknis antara lain adalah masalah pelimpahan wewenang perizinan, pembiayaan pembangunan, pembagian pendapatan, pertanahan, dll. Salah satu pelayanan yang diinginkan oleh calon investor dari pengelola kawasan adalah kemudahan dalam memperoleh berbagai izin yang disyaratkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, yang umumnya dalam bentuk pelayanan satu atap (*one stop service*). Lama pengurusan dan biaya, serta prosedur permintaan izin-izin harus ditetapkan dalam peraturan tersebut.

Pengembangan dan pengoperasian Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam juga akan menyangkut kepentingan dan urusan tingkat daerah, seperti masalah tata ruang, penyediaan dan pengoperasian prasarana dan sarana, dll. Untuk itu perlu dibuat beberapa peraturan daerah yang mengatur kerjasama kedua lembaga.

- 2) Pengembangan infrastruktur. Untuk menunjang kegiatan investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, maka infrastruktur harus dipelihara, dikembangkan dan ditingkatkan. Peningkatan infrastruktur juga melingkupi pengembangan sistem dan prosedur yang memberi kemudahan bagi investor menjalankan usahanya, seperti sistem kepabeanan, sistem keimigrasian, sistem kepelabuhanan, sistem penerbangan, sistem perbankan, dll. Pembangunan infrastruktur dapat dibiayai oleh swasta, pemerintah daerah atau pemerintah pusat.
- 3) Insentif. Insentif yang menarik diperlukan untuk mendatangkan investor. Adanya investasi asing diharapkan akan membuka lapangan kerja, meningkatkan penguasaan

teknologi dan manajemen usaha, mendorong tumbuhnya industri pendukung, dan mendatangkan devisa dari kegiatan ekspor yang dilakukan.

- 4) Tata kelola. Untuk dapat bersaing dengan FTZ lain maka pengelolaan perlu dilakukan secara profesional dengan praktek manajemen standar internasional. Dalam kaitan ini, Badan Pengusahaan Batam dapat membangun suatu pola kerjasama yang sifatnya mutualistik dengan kawasan sejenis di ASEAN. Selain itu, perlu secara seksama memanfaatkan kerjasama ekonomi sub-regional yang telah dikembangkan selama ini, khususnya dalam konteks IMS-GT dan IMT-GT, dengan membuka kerjasama dan hubungan bisnis yang intensif dengan kawasan sejenis di berbagai negara.
- 5) Ketenagakerjaan. Investor yang beroperasi di Batam akan memerlukan tenaga terampil dalam jumlah banyak. Apalagi seiring dengan dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di awal 2016, yang memungkinkan tenaga kerja asing mengisi posisi pada bidang-bidang tertentu, maka hal ini perlu diantisipasi. Pada saat ini tenaga terampil tersebut masih belum mencukupi. Untuk itu agar kekurangan tenaga terampil itu tidak diisi oleh pendatang dari luar Batam atau luar negeri, maka sejak dini generasi muda di Kawasan Batam perlu disiapkan untuk menjadi tenaga-tenaga terampil yang siap dipekerjakan. Pengusaha lokal juga perlu disiapkan untuk dapat menjadi penyalur bahan pangan dan industri bagi perusahaan industri pengolahan dari luar yang akan menjalankan usahanya di Kawasan Batam.
- 6) Kelembagaan. Perlu dilakukan pengaturan yang harmonis antara Pemerintah Pusat, BP Batam dengan Pemko Batam agar pembangunan Kawasan Batam tidak mengalami berbagai kendala. Beberapa kendala yang sering dihadapi antara lain masalah pertanahan, perizinan, pengelolaan, pembiayaan, tata ruang dan lingkungan, dll. Pola hubungan kerjasama antara Pemko Batam dengan BP Batam juga perlu dikaji secara mendalam, sehingga dapat terjadi suatu pola kemitraan yang sinergis antar kedua lembaga. Kejelasan terhadap kewenangan, khususnya antara kewenangan Pusat yang diemban oleh BP Batam dan kewenangan Pemko Batam, perlu ditetapkan untuk menghindari adanya tumpang tindih dan konflik yang mungkin terjadi dalam pengelolaan dan pengusahaan kawasan Batam di masa mendatang.

### **C. Kedudukan Badan Pengusahaan Batam**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007, kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 tahun.

Wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB) meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Wilayah kerja KPBPB ditambah dengan Pulau Janda Berhias dan gugusannya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Kegiatan utama pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam ditujukan dalam bidang ekonomi yang meliputi sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan dan pariwisata. Hak pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam beralih kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).

Penetapan Batam sebagai salah satu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 tahun 2007 dan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2007, maka kelembagaan yang dahulunya adalah Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berubah menjadi ***Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam*** atau disingkat dengan ***Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)***.

Dalam rangka mendukung pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang dijalankan oleh BP Batam, pemerintah mengeluarkan beberapa ketentuan/peraturan sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tanggal 20 Agustus 2007;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 4 Februari 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

4. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 29 Februari 2016 Tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
5. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam;
6. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 146 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan Serta Pengangkatan Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

#### **D. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Batam mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

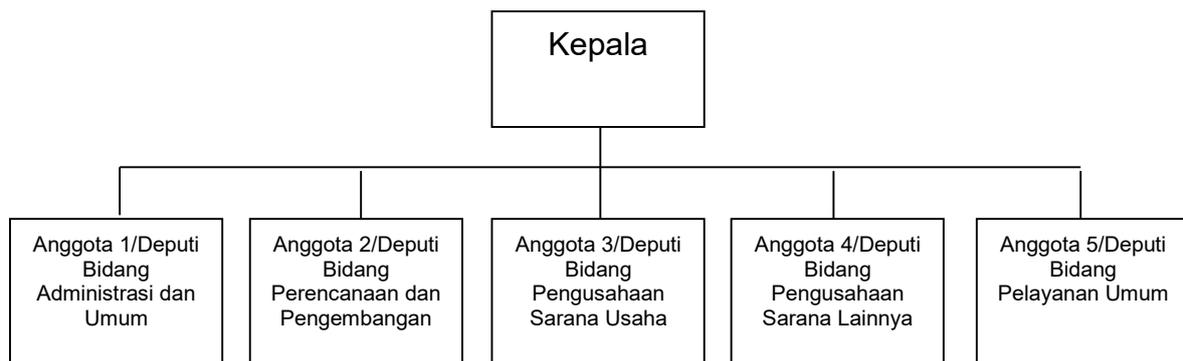
Badan Pengusahaan Batam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Sekretariat, Keuangan, Sumber Daya Manusia, Hukum dan Organisasi, Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi serta Perwakilan;
- b. perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Program dan Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan Teknik, Pengembangan Usaha, Pelayanan dan Pentarifan, dan Pengembangan Manajemen Kinerja;
- c. perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengusahaan Sarana Bandar Udara, Pelabuhan Laut, Rumah Sakit, dan Pengelolaan Lahan;
- d. perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas di bidang Pembangunan Prasarana dan Sarana, Pemanfaatan Aset, serta Pengelolaan Air dan Limbah; dan

- e. perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Lalu Lintas Barang, Promosi dan Hubungan Masyarakat, serta Pengamanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Dewan Kawasan tersebut, Badan Pengusahaan Batam mempunyai kewenangan:
- a. membuat ketentuan-ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
  - b. mengeluarkan izin-izin usaha dan izin lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. membuat peraturan di bidang tata tertib pelayanan dan penerbangan, lalu lintas barang di pelabuhan dan penyediaan fasilitas pelabuhan dan lain sebagainya serta penetapan tarif segala macam jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. melaksanakan tugas dan wewenang lain, yang meliputi:
    - 1) pengelolaan, pembangunan, sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, serta melaksanakan percepatan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sehingga mampu bersaing dengan Kawasan sejenis di negara lain.
    - 2) kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor industri, maritim, perdagangan, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang lainnya;
    - 3) memproses Perizinan Usaha yang telah dilimpahkan kewenangannya kepada Badan Pengusahaan Batam dan melaksanakan Pelayanan Perizinan Terpadu bekerjasama dengan Pemerintah Kota Batam.
  - e. tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d tidak termasuk tugas-tugas dan wewenang Pemerintah Kota Batam, kecuali terhadap tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepada Badan Pengusahaan Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## E. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Dewan Kawasan menetapkan organisasi Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) yang mempunyai susunan organisasi dan tata kerja, berdasarkan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, sebagai berikut



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BP Batam

Dalam melaksanakan tugas, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam dibantu oleh 5 anggota atau deputi yang mempunyai tugas sesuai bidangnya, yaitu

1. Anggota 1/Deputi Bidang Administrasi dan Umum;
2. Anggota 2/Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
3. Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha;
4. Anggota 4/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya;
5. Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum.

Sedangkan sebagai penjabaran dari peraturan dewan kawasan dimaksud Kepala Badan Pengusahaan Batam mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Kerja Dibawah Anggota/Deputi Di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.

## F. Organisasi Pembina dan Asistensi

Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam tanggal 29 Februari 2016, penetapan

kebijakan umum, pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan Badan Pengusahaan Batam dilakukan oleh Dewan Kawasan yang keanggotaannya terdiri dari

- Ketua merangkap anggota : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;  
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;  
3. Menteri Keuangan;  
4. Menteri Perdagangan;  
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional;  
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;  
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
8. Sekretaris Kabinet;  
9. Gubernur Kepulauan Riau;  
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;  
11. Walikota Batam.

Pertumbuhan Daerah Industri Pulau Batam tidak lepas dari peran Dewan Kawasan yang memberikan bimbingan dan arahan yang diberikan kepada BP Batam.

Dewan Kawasan mempunyai tugas sebagai berikut

- a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Bebas Batam yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Batam;
- b. Mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat yang berhubungan dengan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Bebas Batam;
- c. Memberikan bimbingan dan arahan kepada Badan Pengusahaan Batam mengenai pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Bebas Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Pusat di bidang pembangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Kawasan (DK) dapat membentuk Sekretariat Dewan Kawasan dan Tim Teknis. DK melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan DK bertugas selama 5 tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden (Keppres) tersebut.

## G. Lingkungan Strategis yang Bepengaruh

Analisis SWOT (*Strenghts, Weakness, Opportunities and Threats*)

<p><b>Internal</b></p>	<p><b>Kekuatan (Strengths)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan SDM yang handal;</li> <li>2. Lokasi geografis yang strategis berada di selat malaka yang merupakan salah satu jalur pelayaran/perdagangan tersibuk di dunia;</li> <li>3. Badan Pengusahaan Batam diberikan hak pengelolaan lahan di Batam untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembangunan;</li> <li>4. Pelayanan kepada publik dan calon investor yang terintegrasi yang melayani perijinan dalam mall pelayanan publik; pelayanan investasi diberikan kemudahan dengan i23j dan KILK;</li> <li>5. Adanya peningkatan tata kelola aparatur SDM di BP Batam diataranya dengan sistem rekrutmen CAT dan pola insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;</li> <li>6. Hubungan ekonomi regional yang saling mengisi;</li> <li>7. Terjalannya hubungan yang kuat dengan Singapura.</li> </ol>	<p><b>Kelemahan (Weakness)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya Penempatan SDM dengan kompetensi sesuai bidang;</li> <li>2. Pelimpahan peran/wewenang yang dirasa masih diperlukan;</li> <li>3. Masih rendahnya penegakkan hukum terutama dalam mengatasi permasalahan pertanahan;</li> <li>4. Belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur hubungan kerja antara Badan Pengusahaan Batam dengan Pemerintah Kota Batam;</li> <li>5. Belum terpadu dan terintegrasinya kegiatan promosi investasi antara Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam;</li> <li>6. Masih kurangnya kebijakan dan sarana pelatihan ketenagakerjaan untuk mendukung peningkatan ketenagakerjaan;</li> <li>7. Pengaruh ego sektoral antarlingkungan intansi terkait di Batam pada skala lokal dan regional;</li> </ol>
<p><b>Eksternal</b></p>	<p><b>Peluang (Opportunities)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Letak Pulau Batam sangat strategis di salah satu jalur pelayaran internasional paling ramai dan dapat diakses dengan mudah;</li> <li>2. Keuntungan berinvestasi di Batam terletak pada biaya investasi, harga sewa lahan, tenaga kerja, peralatan dan biaya operasional yang kompetitif;</li> <li>3. Tersedianyasarana perhubungan darat, laut dan udara dengan standar internasional untuk memenuhi kebutuhan investasi termasuk tersedianya sarana air bersih dan listrik;</li> <li>4. Komitmen Pemerintah Pusat yang kuat untuk mendukung pengembangan investasi di Indonesia;</li> <li>5. Indonesia telah menjadi lokasi investasi yang menarik;</li> <li>6. Pertumbuhan ASEAN sebagai blok ekonomi yang penting;</li> <li>7. Potensi Indonesia sebagai pusat pelayaran yang penting;</li> </ol>	<p><b>Ancaman (Threats)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pengembangan kawasan baru yang sejenis di beberapa negara Asia, seperti Malaysia, Vietnam, Philipina, Cina dan India;</li> <li>2. Berkembangnya dinamika ekonomi Singapura;</li> <li>3. Pemberlakuan MEA (Masyarakat Ekonomi Asian) dimana seluruh kegiatan perdagangan barang dan jasa dilakukan secara bebas oleh seluruh anggota negara ASEAN;</li> <li>4. Halangan perdagangan yang menahan perkembangan ekonomi.</li> </ol>

	<p>8. Relokasi perusahaan multinasional di beberapa negara akibat globalisasi;</p> <p>9. Munculnya sektor ekonomi baru seperti industri hijau dan teknologi informasi dan komunikasi.</p>	
--	---	--

Gambar 1.2. Analisis SWOT

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Memperhatikan hasil evaluasi Laporan Kinerja Badan Pengusahaan Batam periode sebelumnya, dan dimulainya acuan baru kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengusahaan (BP) Batam Tahun 2015—2019, maka telah ditetapkan 12 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan sasaran strategis BP Batam hingga 5 tahun ke depan.

Dua belas IKU tersebut adalah sebagai berikut

1. persentase jaminan kepastian hukum dalam berinvestasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
2. tersusunnya *granddesign (roadmap)* reformasi birokrasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
3. persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di Badan Pengusahaan Batam;
4. nilai investasi real di 8 fokus industri yang dikembangkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tercapai sebanyak 2,9 milyar dolar Amerika Serikat di tahun 2019;
5. waktu pelayanan perizinan investasi 15 hari;
6. target pendapatan Pelabuhan Laut Batam tercapai 1,6 trilyun rupiah di tahun 2019;
7. waktu pelayanan bongkar muat barang dan kontainer Pelabuhan Laut Batam maksimum 7 hari;
8. target pendapatan Bandara Hang Nadim Batam tercapai 1,1 trilyun rupiah di tahun 2019;
9. waktu pelayanan bongkar muat barang kontainer dan kargo Bandara Hang Nadim maksimum 45 menit;
10. target pendapatan Rumah Sakit Otorita Batam – Badan Pengusahaan Batam tercapai 887 milyar rupiah di tahun 2019;
11. target pendapatan Kantor Air tercapai 365 milyar rupiah di tahun 2019; dan
12. terjaganya kualitas udara dan air yang baik.

Penetapan IKU tersebut telah memenuhi kriteria minimum sebagai indikator kinerja yang baik, antara lain

1. spesifik dan jelas terhadap hasil atau capaian kinerja (tujuan/sasaran/*outcomes*);
2. keterukuran (*measurability*) dan keterkaitan (*relevance*) terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
3. spesifik dan jelas terhadap hasil atau capaian kinerja (tujuan/sasaran/*outcomes*);

4. indikator yang ditetapkan dapat dicapai (*achievable*) oleh organisasi;
5. menggambarkan suatu kinerja yang dicapai dalam kurun waktu tertentu (*timebound*).

Pelaksanaan Tahun Anggaran 2017 ini merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Badan Pengusahaan Batam 2015—2019. Renstra yang disusun bersama-sama dengan melibatkan seluruh komponen organisasi, merupakan dasar dari perencanaan dan harus diimplementasikan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Badan Pengusahaan Batam. Penyusunan Renstra pun telah mengikuti pola, berupa tahapan kegiatan mulai dari yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif.

### **A.1. Visi**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh organisasi pemerintah, dalam hal ini BP Batam.

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2010—2014, serta memperhatikan hasil analisis isu strategis dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015—2019, tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka visi pembangunan BP Batam tahun 2015—2019 seperti yang tertulis di dalam Renstra BP Batam 2015-2019 adalah

## **“Menjadikan Batam sebagai Kawasan Investasi yang Berdaya Saing di Asia Tenggara”**

Berdasarkan visi diatas maka beberapa elemen utama yang tergabung dalam visi BP Batam, antara lain

- a. sebagai pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dalam hal ini BP Batam memiliki komitmen untuk merealisasikan Pulau Batam dalam lingkup pengelolaannya sebagai kawasan yang mampu bersaing dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas lainnya, khususnya di kawasan Asia Tenggara;
- b. elemen kawasan investasi yang berdaya saing mengandung makna suatu kawasan yang menarik bagi kegiatan investasi yang didukung dan difasilitasi oleh

- 1) lokasi yang strategis;
  - 2) kemudahan perizinan, baik barang maupun jasa;
  - 3) sarana prasarana yang berstandar internasional;
  - 4) birokrasi yang mudah;
  - 5) pemberian insentif yang tunduk mengikuti aturan yang dikeluarkan organisasi perdagangan internasional (WTO);
  - 6) mendorong pembentukan usaha kepemilikan pribadi, dan
  - 7) peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- c. Asia Tenggara, merupakan batasan kawasan regional yang ingin dituju sebagai kawasan yang mempunyai kemampuan bersaing dalam mewujudkan tempat usaha yang menguntungkan dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di antara kawasan sejenis di Asia Tenggara.

Dalam rangka menjadi pengelola kawasan yang mampu bersaing, diharapkan mampu pula menarik minat industrialis asing, *trader* dan *bankir* asing, serta pengelola usaha lainnya untuk menempatkan kegiatannya di Batam, yang ditandai tidak hanya dengan kenaikan pertumbuhan nilai realisasi investasi, namun berkembang pula menjadi pusat industri inti yang maju dengan pusat-pusat industri yang terkonsentrasi.

## **A.2. Misi**

Untuk mewujudkan dan merealisasikan visi tersebut maka ditetapkan misi BP Batam, sebagai berikut

- 1. Memantapkan pengelolaan kawasan investasi yang profesional;**
- 2. Mewujudkan kawasan investasi yang memiliki infrastruktur yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);**
- 3. Mewujudkan kawasan investasi yang berwawasan lingkungan.**

Penjelasan Misi:

1. *Memantapkan pengelolaan kawasan investasi yang profesional*; misi ini merupakan langkah utama BP Batam sebagai pengelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dalam upaya meningkatkan pengaturan pengelolaan tugas pokok dan fungsinya melalui cara peningkatan pembangunan sumberdaya manusia yang produktif, kompetitif, profesional yang mengedepankan partisipasi, transparansi, responsibilitas dan berorientasi pada konsesi bersama secara adil, efektif, efisien, akuntabel, serta tunduk dan taat dalam penegakkan supermasi hukum sebagai

sarana untuk menciptakan tata kelola pengelolaan yang baik dan mendukung reformasi birokrasi.

2. *Mewujudkan kawasan investasi yang memiliki infrastruktur yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)*; misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai melalui perwujudan kawasan investasi yang berlandaskan pada etika bisnis dan berkelanjutan yang didukung oleh sarana dan prasarana, baik fisik maupun nonfisik berstandar internasional, serta keunggulan teknologi informatika dan komunikasi yang handal dengan fokus utama pada peningkatan nilai investasi.
3. *Mewujudkan kawasan investasi yang berwawasan lingkungan*; misi ini merupakan upaya dalam memfasilitasi kawasan-kawasan investasi yang dikembangkan dengan berwawasan lingkungan, khususnya dalam konteks penyediaan sarana dan prasarana dasar dengan kapasitas yang memadai, serta kualitas yang berstandar internasional dalam menjaga pengelolaan lingkungan hidup yang mantap guna mendukung kegiatan pengembangan dan pengelolaan investasi. Pengembangan kawasan Batam dilakukan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut Badan Pengusahaan Batam, dalam Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 161 Tahun 2015, menetapkan nilai-nilai Budaya Kerja, yang disingkat dengan SPIRIT, sebagai berikut

1. Service Excellence.

Dalam *Service Excellence* terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengusahaan Batam melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

2. Professional.

Dalam *Professional* terkandung makna bahwa dalam bekerja, pimpinan dan seluruh karyawan di lingkungan Badan Pengusahaan Batam melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

3. Innovative.

Dalam *Innovative* terkandung makna bahwa dalam bekerja, pimpinan dan seluruh karyawan di lingkungan Badan Pengusahaan Batam menggunakan dengan optimal

semua sumber daya yang ada dengan kreatifitas tinggi untuk menghasilkan perbaikan dan perubahan positif yang berkelanjutan ke arah kemajuan.

4. Integrity.

Dalam *Integrity* terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata dan berperilaku dan bertindak, pimpinan dan seluruh karyawan di lingkungan Badan Pengusahaan Batam melakukannya dengan baik dan benar, konsisten serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

5. Entrepreneurship.

Dalam *Entrepreneurship* terkandung makna bahwa pimpinan dan seluruh karyawan di lingkungan Badan Pengusahaan Batam memiliki jiwa dan perilaku menciptakan peluang usaha dengan mempertimbangkan risiko.

### **A.3. Tujuan**

Berdasarkan pada faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*), selanjutnya untuk mencapai Visi dan Misi Badan Pengusahaan Batam ditetapkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan strategi yang tepat untuk digunakan dalam pencapaian dimaksud.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengusahaan Batam adalah sebagai berikut

1. meningkatkan peran kelembagaan yang profesional dalam mengantisipasi persaingan ekonomi dan perdagangan global;
2. menjangkau dan mengembangkan kawasan investasi dalam sektor industri, perdagangan dan pariwisata yang berbasis teknologi informatika dan komunikasi;
3. mengembangkan sarana prasarana kepelabuhanan yang berstandar internasional;
4. mengembangkan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan investasi yang berwawasan lingkungan.

Melalui tujuan di atas maka diharapkan akan menarik dan mengembangkan investasi dalam sektor industri, perdagangan, alih kapal (*transshipment*) dan pariwisata, juga dapat lebih mengembangkan, serta membangun sarana dan prasarana serta infrastruktur yang memadai dalam mendukung pengembangan pembangunan kawasan investasi yang berwawasan lingkungan.

### **A.4. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama**

Upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan lima tahun ke depan maka sasaran strategis Badan Pengusahaan Batam telah ditetapkan dalam tiap tahun anggaran dan merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal itu juga menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun dan

dialokasikan dalam lima periode secara tahunan melalui rangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun.

Badan Pengusahaan Batam dalam menetapkan sasaran adalah bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Badan Pengusahaan Batam, serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh dan melibatkan keseluruhan satuan kerja di lingkungan Badan Pengusahaan Batam. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis. Apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan bahwa tujuan strategis juga telah dapat dicapai.

Selanjutnya, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama halnya seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait.

Secara keseluruhan, sasaran Badan Pengusahaan Batam tahun 2015-2019 dapat dijabarkan sebagai berikut

1. terwujudnya aturan dan regulasi yang berpihak pada pengembangan investasi;
2. terwujudnya profesionalitas dalam manajemen pengelolaan yang menerapkan prinsip *good governance* dan *good corporate governance* dan penerapan *open government*;
3. tercapainya target realisasi nilai investasi dari 8 fokus industri;
4. tersedianya sarana prasarana kepelabuhanan yang menghubungkan simpul jasa kawasan investasi yang berstandar internasional;
5. terciptanya kawasan investasi yang sehat dan berwawasan lingkungan.

Berikut adalah tabel keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1. Meningkatkan peran kelembagaan yang profesional dalam mengantisifasi persaingan ekonomi dan perdagangan global	1.1. Terwujudnya aturan dan regulasi yang berpihak pada pengembangan investasi; 1.2. Terwujudnya profesionalitas dalam manajemen pengelolaan yang menerapkan prinsip <i>good governance</i> dan <i>good corporate governance</i>	1.1.1. Persentase jaminan kepastian hukum dalam berinvestasi di KPBPB Batam 1.1.2. Tersusunnya <i>grand design (roadmap)</i> dan reformasi birokrasi di KPBPB Batam 1.1.3. Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam
2. Menjaring dan mengembangkan kawasan investasi dalam sektor industri, perdagangan dan	2.1. Tercapainya target realisasi nilai investasi dari 8 fokus industri	2.1.1. Nilai investasi real di 8 fokus industri yang dikembangkan KPBPB Batam tercapai sejumlah 2,9 milyar dolar AS di tahun 2019;

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
pariwisata yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.		2.1.2. Waktu pelayanan perizinan investasi 15 hari
3. Mengembangkan sarana prasarana kepelabuhanan yang berstandar internasional	3.1. Tersedianya sarana prasarana kepelabuhanan yang menghubungkan simpul jasa kawasan investasi yang berstandar internasional	3.1.1. Target pendapatan pelabuhan laut tercapai Rp1,6 trilyun di tahun 2019; 3.1.2. Waktu pelayanan bongkar muat barang kontainer dan kargo pelabuhan laut maksimum 7 hari; 3.1.3. Target pendapatan bandara tercapai Rp1,1 trilyun di tahun 2019; 3.1.4. Waktu pelayanan bongkar muat barang kontainer dan kargo bandara Hang Nadim maksimum 45 menit.
4. Mengembangkan pengelolaan lingkungan hidup	4.1. Terciptanya kawasan investasi yang sehat dan berwawasan lingkungan	4.1.1. Target pendapatan rumah sakit tercapai Rp887 milyar di tahun 2019; 4.1.2. Target pendapatan kantor air tercapai Rp356 milyar di tahun 2019; 4.1.3. Terjaganya kualitas udara dan air yang baik

Tabel 2.1. Uraian Keterkaitan Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja BP Batam

Adapun target sasaran BP Batam tiap tahun sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

No.	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Keterangan/Formulasi Perhitungan
1	Presentase jaminan kepastian hukum dalam berinvestasi di KPBPB Batam	33	37	40	44	49	Jumlah regulasi yang telah dilimpahkan Pemerintah Pusat ke BP Batam
2	Tersusunnya <i>grand design</i> dan reformasi birokrasi di KPBPB Batam.	100%	100%	100%	100%	100%	tersedianya pedoman pelaksanaan Road Map RB
3	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam.	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah Unit yang melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja
4	Nilai investasi real di 8 fokus industri yang dikembangkan KPBPB Batam tercapai sejumlah 2,9 Milyar USD di tahun 2019	USD 359.417.326	USD 400.000.000	USD 558.001.149	USD 695.269.432	USD 866.305.712	Nilai Investasi per tahun
5	Waktu pelayanan perijinan investasi 15 hari	4 hari	4 hari	2 hari	2 hari	2 hari	Waktu Layanan Minimum
6	Target pendapatan pelabuhan laut tercapai Rp1,6 Trilyun di tahun 2019	Rp210.855.000.000	Rp214.050.000.000	Rp235.557.217.000	Rp258.088.239.000	Rp282.872.363.000	Pendapatan per tahun
7	Waktu pelayanan bongkar muat barang dan kontainer pelabuhan laut max 7 hari.	4 hari	Waktu Layanan Minimum				
8	Target pendapatan bandara tercapai Rp1,1 Trilyun di tahun 2019	Rp141.398.029.067,27	Rp154.793.375.247,50	Rp192.966.063.331,23	Rp203.794.237.158,54	Rp216.255.541.098,76	Pendapatan per tahun
9	Waktu pelayanan bongkar muat barang kontainer dan kargo Bandara Hang Nadim max 45 menit	45 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	Waktu Layanan Minimum

No.	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Keterangan/Formulasi Perhitungan
10	Target pendapatan Rumah Sakit tercapai Rp887 Milyar di tahun 2019	Rp90.245.000.000	Rp95.717.000.000	Rp96.217.000.000	Rp100.502.000.000	Rp110.552.000.000	Pendapatan per tahun
11	Target pendapatan Kantor Air tercapai Rp365 Milyar di tahun 2019	Rp26.541.000.000	Rp27.744.000.000	Rp28.409.379.000	Rp28.894.847.000	Rp30.394.880.000	Pendapatan per tahun
12	Terjaganya kualitas udara dan air yang baik	100	100	100	100	100	Tersedianya kualitas udara dan air yang memenuhi kepuasan masyarakat

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Sasaran Srategis

### **A.5. Strategi dan Arah Kebijakan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu dipilih strategi yang tepat sehingga dapat mewujudkan visi dan misi. Arah kebijakan strategis BP Batam, merupakan pedoman dalam penyusunan sasaran strategi dan program kerja yang direncanakan dan disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang akan datang dan diharapkan memiliki dampak yang positif terhadap pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis BP Batam dengan mempertimbangkan potensi sumber daya BP Batam dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Bersamaan dengan hal tersebut, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan BP Batam telah dirumuskan dalam rangka mencapai tujuan dalam upaya mencapai visi misi BP Batam, serta mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Ketiga (2015—2019) yang dirumuskan dalam NAWACITA yang memiliki agenda, yaitu (1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warna Negara; (2) membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan; (4) memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi bermartabat dan terpercaya; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; dan (9) memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesiadan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (2005—2025).

Strategi yang akan dilaksanakan BP Batam mencakup eksternal dan internal, yaitu Eksternal:

1. Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan kepelabuhanan, industri dan jasa dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
2. Meningkatkan kualitas kajian dan evaluasi kebijakan dalam peningkatan pengembangan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
3. Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap rencana pengembangan dan promosi pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Internal:

1. Melakukan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dilingkungan kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam antara lain telah dilaksanakannya pemantapan implementasi SAKIP di BP Batam itu sendiri;
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja;
3. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), manajerial dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan akuntabel.

Berikut di bawah ini ditampilkan alur visi yang dijabarkan ke dalam indikator kinerja BP Batam, yaitu

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama BP Batam	Target 2017	Realisasi 2017	%
Menjadikan Batam sebagai Kawasan Investasi yang Berdaya Saing di Asia Tenggara	1 Memantapkan pengelolaan kawasan investasi yang profesional	1 Meningkatkan peran kelembagaan yang profesional dalam mengantisipasi persaingan ekonomi dan perdagangan global.	1.1 Terwujudnya aturan dan regulasi yang berpihak pada pengembangan investasi.	1.1.1 Presentase jaminan kepastian hukum dalam berinvestasi di KPBPB Batam	40	32	80%
			1.2 Terwujudnya profesionalitas dalam manajemen pengelolaan yang menerapkan prinsip <i>good governance</i> dan <i>good corporate governance</i>	1.2.1 Tersusunnya <i>road map</i> reformasi birokrasi di KPBPB Batam.	100%	50	50%
				1.2.2 Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam.	100%	100%	100%
	2 Mewujudkan kawasan investasi yang memiliki infrastruktur yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	2 Menjaring dan mengembangkan kawasan investasi dalam sektor industri, perdagangan dan pariwisata yang berbasis Teknologi, Informatika dan Komunikasi (TIK).	2.1 Tercapainya target realisasi nilai investasi dari 8 fokus industri	2.1.1 Nilai investasi real di 8 fokus industri yang dikembangkan KPBPB Batam tercapai sejumlah 2,9 Milyar USD di tahun 2019	USD 558.001.149	USD 1.116.895.000	200,16%
				2.1.2 Waktu pelayanan perijinan investasi 15 hari	4 hari	3 hari (IP)	125%
		3 Mengembangkan sarana prasarana kepelabuhanan yang berstandar internasional	3.1 Tersedianya sarana prasarana kepelabuhanan yang menghubungkan simpul jasa kawasan investasi yang berstandar internasional	3.1.1 Target pendapatan pelabuhan laut tercapai Rp1,6 Trilyun di tahun 2019	Rp400.000.000.000	Rp397.966.466.740,21	99,49%
				3.1.2 Waktu pelayanan bongkar muat barang dan kontainer pelabuhan laut max 7 hari.	4 hari	2 hari	150%
				3.1.3 Target pendapatan bandara tercapai Rp1,1 Trilyun di tahun 2019	Rp220.889.468.429	Rp236.963.120.913	107,28%
				3.1.4 Waktu pelayanan bongkar muat barang kontainer	30 menit	30 menit	100%

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama BP Batam	Target 2017	Realisasi 2017	%
	3 Mewujudkan kawasan investasi yang berwawasan lingkungan	4 Mengembangkan pengelolaan lingkungan hidup dikawasan-kawasan investasi yang berwawasan lingkungan	4.1 Terciptanya kawasan investasi yang sehat dan berwawasan lingkungan	4.1.1 dan kargo bandara Hang Nadim max 45 menit Target pendapatan Rumah Sakit tercapai Rp887 milyar di tahun 2019	Rp96.217.000.000	Rp65.144.167.896	67,71%
				4.1.2 Target pendapatan Kantor Air tercapai Rp365 milyar di 2019	Rp33.009.865.922	Rp28.222.663.926	85,5%
				4.1.3 Terjaganya kualitas udara dan air yang baik	Minimal Class 3 (Skala 1-4)	Class 3	100%
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>							<b>105,43%</b>

Tabel 2.3. Alur Visi – Misi – Realisasi 2017

## A.6. Program

Untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana diuraikan sebelumnya, Badan Pengusahaan Batam menetapkan kebijakan dan program periode 2015—2019 sebagai arah yang akan diambil sesuai dengan misinya. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan Batam untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta akan memperoleh alokasi anggaran.

Program tahun 2017 yang disusun merupakan upaya pencapaian sasaran pada Renstra Tahun 2015—2019 dijabarkan dalam dua program, sebagai berikut

1. Realisasi Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, sebesar **Rp795.573.008.592,00** dengan realisasi indikator *outcome* **63,65%** dari anggaran sebesar Rp654,175,873,000.00 yang dialokasikan;
2. Realisasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengusahaan Batam, sebesar **Rp737.921.085.884,00** dengan realisasi indikator *outcome* **63,81%** dari anggaran sebesar Rp1.246.783.473.000,00 yang dialokasikan;

sehingga total Realisasi Anggaran pada tahun 2017, yaitu sebesar Rp1.533.494.094.476,00 atau 74,04% dari anggaran sebesar Rp2.071.102.764.000,00 yang dialokasikan.



Gambar 2.1. grafik realisasi Anggaran 2017

## **A.7. Rencana Kinerja**

Penjabaran dari Renstra BP Batam Tahun 2015—2019 yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB Batam). Rencana kinerja BP Batam Tahun 2016 ditetapkan 2 (dua) program, 22 (dua puluh dua) kegiatan dalam rangka pencapaian 5 (lima) sasaran yang telah ditetapkan.

### **Kegiatan pokok (Misi 1)**

#### **Memantapkan pengelolaan kawasan investasi yang profesional**

Dengan mewujudkan, antara lain

- a. Terwujudnya aturan dan regulasi yang berpihak pada pengembangan investasi.  
Dengan indikator kinerja sasaran:
  1. Presentase jaminan kepastian hukum dalam berinvestasi di KPBPB Batam
- b. Terwujudnya profesionalitas dalam manajemen pengelolaan yang menerapkan prinsip *good governance* dan *good corporate governance*, dengan indikator kinerja sasaran:
  1. Tersusunnya *road map* reformasi birokrasi di KPBPB Batam;
  2. Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di KPBPB Batam.

### **Kegiatan pokok (Misi 2)**

#### **Mewujudkan kawasan investasi yang memiliki infrastruktur yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**

- a. Tercapainya target realisasi nilai investasi dari 8 fokus industri.  
Dengan Indikator kinerja sasaran:
  1. Nilai investasi real di 8 fokus industri yang dikembangkan KPBPB Batam tercapai sejumlah 2,9 Milyar USD di tahun 2019,
  2. Waktu pelayanan perijinan investasi 15 hari.
- b. Tersedianya sarana prasarana kepelabuhanan yang menghubungkan simpul jasa kawasan investasi yang berstandar internasional.  
Dengan indikator kinerja sasaran:
  1. Target pendapatan pelabuhan laut tercapai Rp1,6 Trilyun di tahun 2019,
  2. Waktu pelayanan bongkar muat barang dan kontainer pelabuhan laut max 7 hari,
  3. Target pendapatan bandara tercapai Rp1,1 Trilyun di tahun 2019,
  4. Waktu pelayanan bongkar muat barang kontainer dan kargo Bandara Hang Nadim max 45 menit.

### **Kegiatan pokok (Misi 3)**

#### **Mewujudkan kawasan investasi yang berwawasan lingkungan**

a. Peningkatan pelayanan dibidang perizinan. Dengan indikator kinerja sasaran:

1. Target pendapatan Rumah Sakit tercapai 887 milyar rupiah di tahun 2019,
2. Target pendapatan Kantor Air tercapai 365 milyar rupiah di 2019,
3. Terjaganya kualitas udara dan air yang baik.

Di bawah ini dapat dilihat hubungan antara IKU dan kegiatan-kegiatan yang bertanggung jawab terhadap IKU tersebut

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	NAMA UNIT PELAKSANA	IKU		No. IKU
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP Batam</b>	824,319,291,000.00	737,934,094,683.36	89.52				
Penyusunan Perencanaan Program dan Penelitian Pengembangan (5113)	6,565,661,000.00	3,825,002,961.00	58.26	Biro Perencanaan Program dan Penelitian dan Pengembangan	Tersusunnya <i>road map</i> reformasi birokrasi di KPBPB Batam.	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam.	2, 3
Pelayanan Kerumahtangaan, Kesekretariatan dan Pengadaan Barang/ Jasa (5114)	77,183,582,000.00	68,141,898,357.97	88.29	Biro Umum dan Sekretariat		Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam.	3
Pengelolaan dan Pelayanan Kepegawaian (5115)	714,652,862,000.00	649,978,463,273.00	90.95	Biro Sumber Daya Manusia	Tersusunnya <i>road map</i> reformasi birokrasi di KPBPB Batam.	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam.	2,3
Pengelolaan Administrasi Keuangan (5116)	4,358,686,000.00	2,337,360,533.39	53.63	Biro Keuangan	Tersusunnya <i>road map</i> reformasi birokrasi di KPBPB Batam.	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam.	2,3
Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum (5117)	4,689,643,000.00	2,319,066,571.00	49.45	Biro Hukum dan Organisasi	Presentase jaminan kepastian hukum dalam berinvestasi di KPBPB Batam		1

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	NAMA UNIT PELAKSANA	IKU	No. IKU	
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Swasta (5118)	6,338,263,000.00	5,232,626,042.00	82.56	Kantor Perwakilan Badan Pengusahaan Batam	Tersusunnya <i>road map</i> reformasi birokrasi di KPBPB Batam.	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam.	2, 3
Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan (5119)	6,558,642,000.00	3,421,656,837.00	52.17	Biro Perencanaan Teknik	Tersusunnya <i>road map</i> reformasi birokrasi di KPBPB Batam.	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam.	2, 3
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Usaha (5120)	605,336,000.00	414,962,829.00	68.55	Biro Perencanaan Pengembangan Usaha, Pelayanan dan Pentarifan	Tersusunnya <i>road map</i> reformasi birokrasi di KPBPB Batam.	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam.	2, 3
Penyusunan dan Pengawasan Manajemen Kinerja Organisasi (5121)	1,015,810,000.00	654,036,134.00	64.39	Biro Pengembangan Manajemen Kinerja	Tersusunnya <i>road map</i> reformasi birokrasi di KPBPB Batam.	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam.	2, 3
Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan (5122)	2,350,806,000.00	1,609,021,145.00	68.45	Satuan Pemeriksa Internal	Tersusunnya <i>road map</i> reformasi birokrasi di KPBPB Batam.	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam.	2, 3

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	NAMA UNIT PELAKSANA	IKU		No. IKU
<b>Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB Batam</b>	654,175,873,000.00	416,390,959,836.28	63.65				
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB-Batam (5123)	66,727,224,000.00	14,308,508,836.00	21.44	Kantor Pengelolan Lahan	Nilai investasi real di 8 fokus industri yang dikembangkan KPBPB Batam tercapai sejumlah 2.9 Milyar USD di tahun 2019	Waktu pelayanan perijinan investasi 15 hari	4, 5
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (5124)	119,117,056,000.00	39,925,409,754.96	33.52	Kantor Pelabuhan Laut Batam	Target pendapatan pelabuhan laut tercapai Rp1.6 Trilyun di tahun 2019	Waktu pelayanan bongkar muat barang dan kontainer pelabuhan laut max 7 hari.	6, 7
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara (5125)	146,869,872,000.00	118,389,419,724.00	80.61	Kantor Bandar Udara Hang Nadim Batam	Target pendapatan bandara tercapai Rp1.1 Triliyun di tahun 2019	Target pendapatan bandara tercapai Rp1.1 Triliyun di tahun 2019	8, 9
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan (5126)	96,533,967,000.00	66,224,312,348.31	68.60	Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam	Target pendapatan Rumah Sakit tercapai Rp887 milyar di tahun 2019		10
Pengelolaan dan Pengendalian Mutu Prasarana dan Sarana (5127)	21,008,905,000.00	13,090,893,026.00	62.31	Direktorat Pembangunan Prasarana dan Sarana	Nilai investasi real di 8 fokus industri yang dikembangkan KPBPB Batam tercapai sejumlah 2.9 Milyar USD di tahun 2019	Waktu pelayanan perijinan investasi 15 hari	4, 5

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	NAMA UNIT PELAKSANA	IKU	No. IKU	
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Data Centre dan Sistem Informasi (5128)	67,663,555,000.00	58,341,033,785.00	86.22	Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Nilai investasi real di 8 fokus industri yang dikembangkan KPBPB Batam tercapai sejumlah 2.9 Milyar USD di tahun 2019	Waktu pelayanan perijinan investasi 15 hari	4, 5
Pelayanan Lalu Lintas Barang Kawasan PBPB Batam (5129)	3,489,880,000.00	2,376,966,327.00	68.11	Direktorat Lalu Lintas Barang	Nilai investasi real di 8 fokus industri yang dikembangkan KPBPB Batam tercapai sejumlah 2.9 Milyar USD di tahun 2019	Waktu pelayanan perijinan investasi 15 hari	4, 5
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air dan Limbah (5130)	34,816,930,000.00	30,749,640,417.51	88.32	Kantor Pengelolaan Air dan Limbah	Target pendapatan Kantor Air tercapai Rp365 milyar di 2019	Terjaganya kualitas udara dan air yang baik	11, 12
Pelayanan Pemasaran dan Kehumasan (5131)	22,629,449,000.00	19,237,564,105.50	85.01	Direktorat Promosi dan Hubungan Masyarakat	Nilai investasi real di 8 fokus industri yang dikembangkan KPBPB Batam tercapai sejumlah 2.9 Milyar USD di tahun 2019	Waktu pelayanan perijinan investasi 15 hari	4, 5
Pelayanan Perizinan Terpadu Kawasan PBPB- Batam (5132)	5,604,963,000.00	2,829,453,667.00	50.48	Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai investasi real di 8 fokus industry yang dikembangkan KPBPB Batam tercapai sejumlah 2.9 Milyar USD di tahun 2019	Waktu pelayanan perijinan investasi 15 hari	4, 5

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	NAMA UNIT PELAKSANA	IKU		No. IKU
Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset (5133)	48,425,375,000.00	38,793,394,620.00	80.11	Direktorat Pemanfaatan Aset	Nilai investasi real di 8 fokus industri yang dikembangkan KPBPB Batam tercapai sejumlah 2.9 Milyar USD di tahun 2019	Waktu pelayanan perijinan investasi 15 hari	4, 5
Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Asset Investasi (5134)	21,288,697,000.00	12,124,363,225.00	56.95	Direktorat Pengamanan	Nilai investasi real di 8 fokus industri yang dikembangkan KPBPB Batam tercapai sejumlah 2.9 Milyar USD di tahun 2019	Waktu pelayanan perijinan investasi 15 hari	4, 5
<b>JUMLAH</b>	1,478,495,164,000.00	1,154,325,054,519.64	78.07				

Tabel 2.4. Hubungan Kegiatan Terhadap IKU

## B. Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja BP Batam adalah sebagai berikut

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2017
1.1	Terwujudnya aturan dan regulasi yang berpihak pada pengembangan investasi.	1.1.1	Presentase jaminan kepastian hukum dalam berinvestasi di KPBPB Batam	40
1.2	Terwujudnya profesionalitas dalam manajemen pengelolaan yang menerapkan prinsip <i>good governance</i> dan <i>good corporate governance</i>	1.2.1	Tersusunnya road map reformasi birokrasi di KPBPB Batam.	100%
		1.2.2	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam.	100%
2.1	Tercapainya target realisasi nilai investasi dari 8 fokus industri	2.1.1	Nilai investasi real di 8 fokus industri yang dikembangkan KPBPBBatam tercapai sejumlah 2.9 Milyar USD di tahun 2019	USD 558.001.149
		2.1.2	Waktu pelayanan perijinan investasi 15 hari	4 hari
3.1	Tersedianya sarana prasarana kepelabuhanan yang menghubungkan simpul jasa kawasan investasi yang berstandar internasional	3.1.1	Target pendapatan pelabuhan laut tercapai Rp1.6 Trilyun di tahun 2019	Rp400.000.000.000
		3.1.2	Waktu pelayanan bongkar muat barang dan kontainer pelabuhan laut max 7 hari.	4 hari
		3.1.3	Target pendapatan bandara tercapai Rp1,1 Trilyun di tahun 2019	Rp220.889.468.429
		3.1.4	Waktu pelayanan bongkar muat barang kontainer dan kargo bandara Nang Nadim max 45 menit	30 menit
4.1	Terciptanya kawasan investasi yang sehat dan berwawasan lingkungan	4.1.1	Target pendapatan Rumah Sakit tercapai Rp887 milyar di tahun 2019	Rp96.217.000.000
		4.1.2	Target pendapatan Kantor Air tercapai Rp365 milyar di 2019	Rp33.009.865.922
		4.1.3	Terjaganya kualitas udara dan air yang baik	Minimal Class 3 (Skala 1-4)

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Pengukuran Kinerja: Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Pengukuran Kinerja Badan Pengusahaan Batam Tahun 2017 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Indikator kinerja yang digunakan terdiri dari indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator-indikator tertentu (*outputs* atau *outcomes*) yang paling mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran yang tertuang dalam Renstra BP Batam 2015-2019. Indikator *inputs* adalah semua kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan keluaran, yaitu berupa dana, sumber daya manusia, informasi, dan sebagainya. Indikator *outputs* adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan yang dapat dirasakan secara langsung, baik berupa fisik maupun nonfisik. Indikator *outcomes* adalah suatu gambaran dari hasil nyata suatu kegiatan yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh lingkungan di sekitarnya.

#### B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Hasil evaluasi dan analisis Akuntabilitas Kinerja Badan Pengusahaan Batam dilakukan dengan membandingkan rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang diakibatkan oleh realisasi yang berbeda dengan yang direncanakan.

Badan Pengusahaan Batam dalam tahun 2017 telah menetapkan 5 Sasaran Strategis yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 2 Program dan 22 Kegiatan, dan secara detail capaian kinerja sasaran diuraikan berikut ini.

Sasaran *Pertama* Terwujudnya aturan dan regulasi yang berpihak pada pengembangan investasi. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 1 (satu) indikator, yaitu

- 1) Presentase jaminan kepastian hukum dalam berinvestasi di KPBPB Batam.

Melalui kegiatan Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum (5117) telah dikeluarkan peraturan yang menjamin kepastian hukum berinvestasi dengan pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI		(%)
1		2		3		4		5
1	Terwujudnya aturan dan regulasi yang berpihak pada pengembangan investasi	1	Presentase jaminan kepastian hukum dalam berinvestasi di KPBPB Batam	40	Dokumen	32	Dokumen	80

Tabel 3.1. Indikator Kinerja Sasaran Ke-1

Dari hasil kegiatan tersebut terlihat dari indikator pertama dapat direalisasikan 80% dari target yang ditetapkan.

Sasaran *Kedua*, Terwujudnya Profesionalitas Dalam Manajemen Pengelolaan yang Menerapkan Prinsip *Good Governance* dan *Good Corporate Governance*. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 indikator, yaitu

- 1) Tersusunnya *road map* reformasi birokrasi di KPBPB Batam,
- 2) Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam.

Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI		(%)
1		2		3		4		5
1	Terwujudnya profesionalitas dalam manajemen pengelolaan yang menerapkan prinsip good governance dan good corporate governance	1	Tersusunnya <i>granddesign</i> dan reformasi birokrasi di KPBPB Batam	100	%	50	%	50
		2	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam	100	%	100	%	100

Tabel 3.2. Indikator Kinerja Sasaran ke-2

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Tahun 2017 BP Batam belum menyelesaikan dokumen *road map* reformasi birokrasi sehingga pada tahun 2018 diharapkan kegiatan tersebut akan dilanjutkan hingga finalisasi.

Indikator Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam dinilai dari komitmen 22 unit yang ada di BP Batam dalam melaksanakan pelaporan akuntabilitas kinerjanya. Pada tahun 2017 jumlah unit yang telah melaksanakan pelaporan akuntabilitas kinerja sebanyak 22 unit kerja atau dengan realisasi tingkat pelaksanaan sebesar 100%.

Sasaran *Ketiga* Tercapainya Target Realisasi Nilai Investasi dari 8 Fokus Industri. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator, yaitu

- 1) Nilai investasi real di 8 fokus industri yang dikembangkan KPBPB Batam tercapai sejumlah 2.9 Milyar USD di tahun 2019,
- 2) Waktu pelayanan perijinan investasi 15 hari.

Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI		(%)
1		2		3		4		5
1	Tercapainya target realisasi nilai investasi dari 8 fokus industri	1	Nilai investasi real di 8 fokus industri yang dikembangkan KPBPBBatam tercapai sejumlah 2.9 Milyar USD di tahun 2019.	558.001.149	USD	1.116.895.000	USD	200,16
		2	Waktu pelayanan perijinan investasi 15 hari	4	hari	3	hari	125

Tabel 3.3. Indikator Kinerja Sasaran ke-3

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa indikator kinerja untuk realisasi nilai investasi di 8 fokus industri yang dikembangkan KPBPB Batam adalah sebesar 1.116.895.000 dollar Amerika Serikat (AS) atau realisasi sebesar 200,16% dari target nilai investasi yang diharapkan sebesar 558.001.149 dollar Amerika Serikat (AS) sesuai yang dicantumkan dalam Renstra BP Batam 2015-2019. Jika dilihat dari tahun 2016, maka terjadi pertumbuhan sebesar 136,95% dari investasi tahun 2016 sebesar 471.368.000 dollar AS. Artinya, Batam masih diminati menjadi salah satu tujuan investasi.

Upaya untuk mendorong percepatan realisasi investasi nampak jelas dengan adanya percepatan program i23j dan KILK, yaitu dengan penambahan kegiatan di antaranya Rekomendasi Jalur Hijau di mana BP Batam bekerjasama dengan Kepala Kantor Bea Cukai Kota Batam guna memberikan layanan percepatan pemasukan barang modal bagi investor. Serta ditunjang pula dengan telah diperolehnya sertifikat ISO 9001:2015 di Pelayanan Penanaman Modal BP Batam.

Untuk indikator waktu pelayanan perijinan investasi yang ada di BP Batam, target waktu pelayanan perijinan investasi paling lama diselesaikan dalam 4 hari, namun pada realisasinya waktu pelayanan perijinan dapat diselesaikan dalam waktu 3 hari atau dengan realisasi sebesar 125%.

*Sasaran Keempat*, Tersedianya Sarana Prasarana Kepelabuhanan yang Menghubungkan Simpul Jasa Kawasan Investasi yang Berstandar Internasional. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 4 indikator, yaitu:

- 1) Target pendapatan pelabuhan laut tercapai Rp1,6 Trilyun di tahun 2019,
- 2) Waktu pelayanan bongkar muat barang dan kontainer pelabuhan laut maksimal 7 hari,
- 3) Target pendapatan bandara tercapai Rp1,1 Triliyun di tahun 2019,
- 4) Waktu pelayanan bongkar muat barang kontainer dan kargo bandara Hang Nadim maksimal 45 menit.

Pencapaian target indikator kinerja tersebut digambarkan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI		(%)
1		2		3		4		5
1	Tersedianya sarana prasarana kepelabuhanan yang menghubungkan simpul jasa kawasan investasi yang berstandar internasional	1	Target pendapatan pelabuhan laut tercapai 1.6 Trilyun di tahun 2019	400.000.000.000	Rp	397.966.466.740,21	Rp	99,49
		2	Waktu pelayanan bongkar muat barang dan kontainer pelabuhan laut max 7 hari.	4	Hari	2	Hari	150
		3	Target pendapatan bandara tercapai Rp1,1 Triliyun di tahun 2019	220.889.468.429	Rp	236.963.120.913	Rp	107,28
		4	Waktu pelayanan bongkar muat barang kontainer dan kargo bandara Hang Nadim max 45 menit	30	Menit	30	Menit	100

Tabel 3.4. Indikator Kinerja Sasaran ke-4

Indikator pendapatan pelabuhan laut, didapati sebesar Rp 397.966.466.740,21,-, ini adalah angka dari Penerimaan bersih (PNBP), sedangkan pendapatan pelabuhan laut termasuk piutang usaha adalah sebesar Rp 444.318.489.417,90,- atau dengan realisasi sebesar 99,49% dari yang semula ditargetkan sebesar Rp 400.000.000.000,-.

Indikator waktu pelayanan bongkar muat barang dan kontainer pelabuhan laut, ditargetkan paling lama 4 hari, namun realisasi pelayanan bongkar muat barang dan kontainer pada tahun 2017 selama 2 hari atau Peningkatan waktu layanan sebesar 150%.

Indikator pendapatan Bandara, didapati sebesar Rp236.963.120.913 atau dengan realisasi sebesar 107,28% dari yang semula ditargetkan sebesar Rp 220.889.468.429,-, sedangkan pendapatan Bandara termasuk piutang usaha adalah sebesar Rp 249.056.052.354.83,-

Indikator waktu pelayanan bongkar muat barang kontainer dan kargo bandara Hang Nadim ditargetkan selama 30 menit, dengan realisasi dapat dilayani selama 30 menit, atau dengan besar persentase peningkatan 100%.

Sasaran *Kelima*, Terciptanya Kawasan Investasi yang Sehat dan Berwawasan Lingkungan. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi

- 1) Target pendapatan Rumah Sakit tercapai 887 milyar rupiah di tahun 2019,
- 2) Target pendapatan Kantor Air tercapai 365 milyar rupiah di 2019,
- 3) Terjaganya kualitas udara dan air yang baik.

Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI		(%)
1		2		3		4		5
1	Terciptanya kawasan investasi yang sehat dan berwawasan lingkungan	1	Target pendapatan Rumah Sakit tercapai Rp887 milyar di tahun 2019	96.217.000.000	Rp	65.144.167.896	Rp	67,71
		2	Target pendapatan Kantor Air tercapai Rp365 milyar di 2019	33.009.865.922	Rp	28.222.663.926	Rp	85,5
		3	Terjaganya kualitas udara dan air yang baik.	Minimal Class 3 (Skala 1-4)	Standar kualitas air dan udara	Class 3	Standar kualitas air dan udara	100

Tabel 3.5. Indikator Kinerja Sasaran Ke-5

Untuk tahun 2016 rumah sakit memperoleh pendapatan sebesar Rp 65.144.167.896,- atau 67,71% dari target pendapatan Rp 96.217.000.000,-. sedangkan pendapatan Rumah Sakit termasuk piutang usaha adalah sebesar Rp 78.950.060.429,-

Indikator Pendapatan Kantor Air dan Limbah, memperoleh pendapatan sebesar Rp 28.222.663.926,- atau realisasi sebesar 85,5% terhadap target pendapatan yang telah ditetapkan, yakni sebesar Rp 33.009.865.922,-.

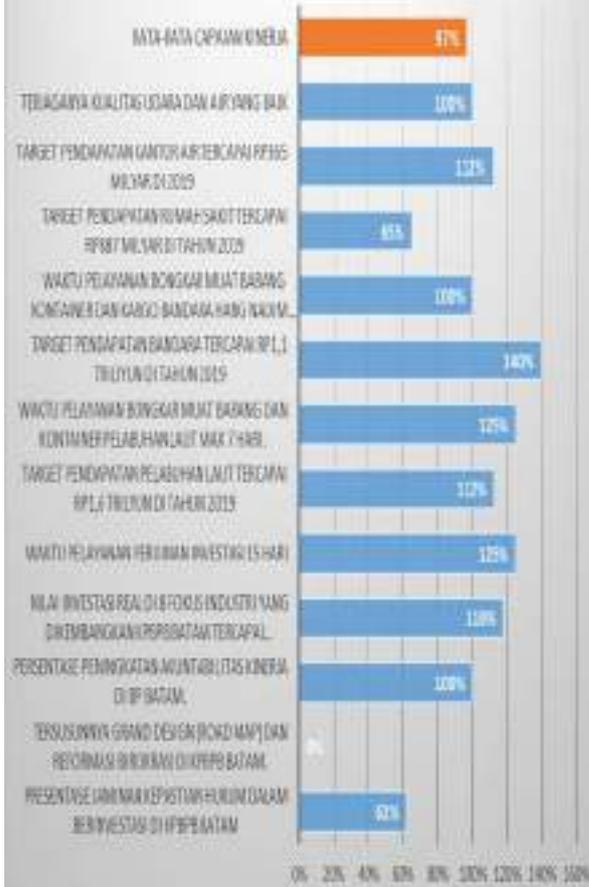
Indikator terjaganya kualitas udara dan air yang baik, dalam hal ini data yang diperoleh hanya dari hasil uji kualitas air, yaitu masuk ke dalam Class 3 dari target Minimal Class 3 (Skala 1-4) dengan realisasi 100%. Sedangkan untuk hasil uji kualitas udara merupakan kewenangan Pemerintah Kota.

#### A. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017

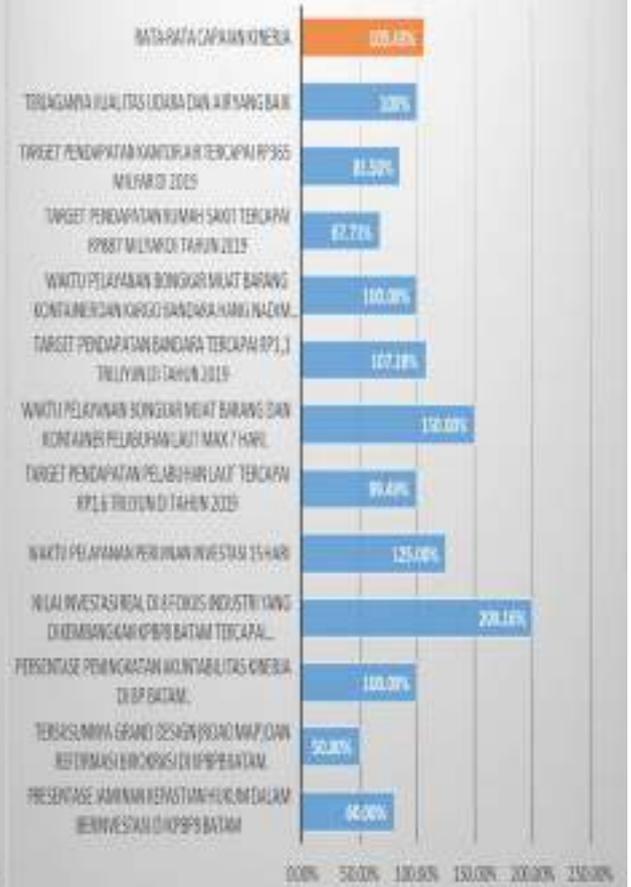
Secara umum dapat dilihat jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 dengan capaian sebesar 97% dan pada tahun 2017 sebesar 103,97%, maka terjadi peningkatan kinerja sebesar 7,41%.

Adapun capaian capaian strategis program pada tahun 2016 dan 2017 dapat terlihat pada tabel berikut :

## Capaian IKU 2016



## Capaian IKU 2017



No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Capaian 2016 (%)	Capaian 2017 (%)
1.	Terwujudnya aturan dan regulasi yang berpihak pada pengembangan investasi.	1.	Presentase jaminan kepastian hukum dalam berinvestasi di KPBPB Batam	62	80
2.	Terwujudnya profesionalitas dalam manajemen pengelolaan yang menerapkan prinsip good governance dan good corporate governance	2.	Tersusunnya road map reformasi birokrasi di KPBPB Batam.	0	50
		3.	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam.	100	100
3.	Tercapainya target realisasi nilai investasi dari 8 fokus industry	4.	Nilai investasi real di 8 fokus industri yang dikembangkan KPBPB Batam tercapai sejumlah 2.9 Milyar USD di tahun 2019	118	200.16
		5.	Waktu pelayanan perijinan investasi 15 hari	125	125
4.	Tersedianya sarana prasarana kepelabuhanan yang menghubungkan simpul jasa kawasan investasi yang berstandar internasional	6.	Target pendapatan pelabuhan laut tercapai 1.6 Trilyun di tahun 2019	112	99.49
		7.	Waktu pelayanan bongkar muat barang dan container pelabuhan laut max 7 hari.	125	150
		8.	Target pendapatan bandara tercapai 1.1 Triliyun di tahun 2019	140	107.28
		9.	Waktu pelayanan bongkar muat barang container dan cargo bandara hang nadim max 45 menit	100	100
5.	Terciptanya kawasan investasi yang sehat dan berwawasan lingkungan	10.	Target pendapatan Rumah Sakit tercapai 887 milyar di tahun 2019	65	67.71
		11.	Target pendapatan Kantor Air tercapai 365 milyar di 2019	112	85.5
		12.	Terjaganya kualitas udara dan air yang baik	100	100
				<b>97</b>	<b>105,43</b>

Tabel 3.6. Perbandingan Kinerja 2016-2017

## C. Akuntabilitas Keuangan

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PNBP tahun 2017 dan 2016

Realisasi Penerimaan (PNBP) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Badan Pengusahaan Batam) tahun 2017 adalah sebesar Rp953.510.894.626,00 atau 82,32% dari target PNBP sebesar Rp1.158.197.829.000,00 dengan rincian per unit sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Kantor Pusat	603.348.170.000,00	224.576.747.316,00	37,22
2	Kantor Air dan Air Limbah	28.409.379.000,00	28.222.663.926,00	99,34
3	Kantor Bandara Hang Nadim	192.966.063.000,00	236.963.120.913,00	122,80
4	Kantor Pelabuhan Laut	235.557.217.000,00	397.966.446.740,00	168,95
5	Rumah Sakit BP Batam	96.217.000.000,00	65.144.167.896,00	67,71
6	Kantor Perwakilan Jakarta	1.700.000.000,00	637.747.835,00	37,51
	<b>Jumlah</b>	<b>1.158.197.829.000,00</b>	<b>953.510.894.626,00</b>	<b>82,32</b>

Tabel 3.7. Realisasi PNBP 2017  
(Sumber: Laporan Keuangan Unaudited BP Batam 2017)

Jika dibandingkan dengan Realisasi Penerimaan (PNBP) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Badan Pengusahaan Batam) tahun 2016 adalah sebesar Rp939.301.312.136.36 atau 112,51% dari target sebesar Rp834.869.200.000 dengan rincian per unit sebagai berikut:

No.	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
<b>A</b>	<b>KANTOR PUSAT</b>	<b>371,714,200,000.00</b>	<b>432,292,203,459.97</b>	116.30%
1	DIREKTORAT PENGELOLAAN LAHAN	330,469,200,000.00	352,015,204,123.34	106.52%
2	KANTOR PDSI	12,176,500,000.00	9,938,356,505.00	81.62%
3	DIREKTORAT LALU LINTAS BARANG	150,000,000.00	89,620,000.00	59.75%
4	BIRO KEUANGAN	9,740,500,000.00	51,885,314,889.63	532.68%
5	DIREKTORAT PEMBANGUNAN SARANA & PRASARANA	3,000,000,000.00	1,786,715,500.00	59.56%
6	DIREKTORAT PEMANFAATAN ASET	16,178,000,000.00	16,576,992,442.00	102.47%
7	UNIT LAINNYA	-	-	0.00%
<b>B</b>	<b>UNIT MANDIRI</b>	<b>463,155,000,000.00</b>	<b>507,009,108,676.39</b>	109.47%
1	KANTOR BANDAR UDARA	123,584,000,000.00	172,572,126,662.93	139.64%
2	KANTOR PELABUHAN LAUT	214,050,000,000.00	240,072,427,067.82	112.16%
3	RUMAH SAKIT	95,717,000,000.00	62,370,419,831.10	65.16%
4	DIREKTORAT AIR & AIR LIMBAH	27,744,000,000.00	30,996,864,202.05	111.72%
5	KANTOR PERWAKILAN JAKARTA	2,060,000,000.00	997,270,912.49	48.41%
	<b>JUMLAH</b>	<b>834,869,200,000.00</b>	<b>939,301,312,136.36</b>	<b>112.51%</b>

Tabel 3.8. Realisasi PNBP 2016

## 2. Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran 2017 dan 2016

Realisasi penyerapan anggaran Badan Pengusahaan Batam pada tahun 2017 adalah sebesar Rp1.533.494.094.476,00 atau mencapai **74,04%** dari anggarannya sebesar Rp2.071.102.764.000,00.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2016, kemampuan penyerapan anggaran mengalami penurunan dimana realisasi penyerapan anggaran tahun 2016 adalah sebesar Rp1,312,488,860,060.23 atau **89,97%** dari anggarannya sebesar Rp1,458,858,933,000,00.

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>112.01.3200.568717.KP.01</b>	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP.Batam</b>	<b>824.319.291.000,00</b>	<b>737.921.085.884,00</b>	<b>89,52</b>
112.01.3200.568717.KP.01.5113	Penyusunan Perencanaan Program dan Penelitian Pengembangan	6.565.661.000,00	3.825.002.961,00	58,26
112.01.3200.568717.KP.01.5114	Pelayanan Kerumahtanggaan Kesekretariatan dan Pengadaan Barang/Jasa	77.183.582.000,00	68.116.898.358,00	88,25
112.01.3200.568717.KP.01.5115	Pengelolaan dan Pelayanan Kepegawaian	714.652.862.000,00	649.978.463.273,00	90,95
112.01.3200.568717.KP.01.5116	Pengelolaan Administrasi Keuangan	4.358.686.000,00	2.349.949.734,00	53,91
112.01.3200.568717.KP.01.5117	Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum	4.689.643.000,00	2.319.066.571,00	49,45
112.01.3200.568717.KP.01.5118	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah maupun Swasta	6.338.263.000,00	5.232.652.042,00	82,56
112.01.3200.568717.KP.01.5119	Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan	6.558.642.000,00	3.421.032.837,00	52,16
112.01.3200.568717.KP.01.5120	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Usaha	605.336.000,00	414.962.829,00	68,55
112.01.3200.568717.KP.01.5121	Penyusunan dan Pengawasan Manajemen Kinerja Organisasi	1.015.810.000,00	654.036.134,00	64,39
112.01.3200.568717.KP.01.5122	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan	2.350.806.000,00	1.609.021.145,00	68,45
<b>112.01.3200.568717.KP.06</b>	<b>Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB. Batam</b>	<b>1.246.783.473.000,00</b>	<b>795.573.008.592,00</b>	<b>63,81</b>
112.01.3200.568717.KP.06.5123	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB-Batam	66.727.224.000,00	14.302.461.836,00	21,43
112.01.3200.568717.KP.06.5124	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut	274.874.656.000,00	172.464.729.978,00	62,74
112.01.3200.568717.KP.06.5125	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara	146.869.872.000,00	118.402.882.019,00	80,62
112.01.3200.568717.KP.06.5126	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan	218.093.967.000,00	187.602.873.283,00	86,02
112.01.3200.568717.KP.06.5127	Pengelolaan dan Pengendalian Mutu Prasarana dan Sarana	27.308.905.000,00	15.179.209.360,00	22,43
112.01.3200.568717.KP.06.5128	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Data Center dan Sistem Informasi	67.663.555.000,00	58.341.033.785,00	86,22
112.01.3200.568717.KP.06.5129	Pelayanan Lalu Lintas Barang Kawasan PBPB Batam	3.489.880.000,00	2.376.966.327,00	68,11

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
112.01.3200.568717.KP.06.5130	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air dan Limbah	343.806.930.000,00	153.918.076.386,00	44,77
112.01.3200.568717.KP.06.5131	Pelayanan Pemasaran dan Kehumasan	22.629.449.000,00	19.237.564.106,00	84,64
112.01.3200.568717.KP.06.5132	Pelayanan Perizinan Terpadu Kawasan PPPB Batam	5.604.963.000,00	2.829.453.667,00	50,48
112.01.3200.568717.KP.06.5133	Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset	48.425.375.000,00	38.793.394.621,00	79,92
112.01.3200.568717.KP.06.5134	Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Aset Investasi	21.288.697.000,00	12.124.363.225,00	56,95
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>2.071.102.764.000,00</b>	<b>1.533.494.094.476,00</b>	<b>74,04</b>

Tabel 3.9. Realisasi Penyerapan Anggaran 2017  
(Sumber: Laporan Keuangan Unaudited BP Batam 2017)

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban Badan Pengusahaan Batam terhadap capaian kinerja selama tahun 2017 yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai, Badan Pengusahaan menunjukkan kinerja yang baik, meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian.

Melihat hasil yang dicapai pada tahun kerja 2017 dapat disimpulkan bahwa Badan Pengusahaan Batam telah berupaya secara sungguh-sungguh melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dalam rangka pencapaian Visi dan Misi. Dari 5 (lima) Sasaran Strategis yang ditetapkan, masih terdapat beberapa sasaran yang belum mencapai target kinerja yang diharapkan, namun kinerja keuangan secara umum melebihi dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan pengukuran terhadap indikator kinerja sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja Badan Pengusahaan Batam Tahun 2017, menunjukkan capaian sasaran strategis dengan nilai rata-rata capaian sebesar 105,43%. Sementara disisi lain terdapat peningkatan yang sangat tajam pada indikator realisasi investasi PMA yang masuk ke Batam sebesar 200,16%. Hal ini merupakan hasil dari upaya BP Batam dalam meningkatkan pelayanan publik, perbaikan infrastruktur dan penunjang lainnya serta dukungan dari stakeholder lain dalam mewujudkan paket kebijakan ekonomi jilid II terkait dengan investasi yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pada tahun 2017 telah dilakukan pendatanganan Surat Keputusan bersama antara Menteri Perhubungan dengan Kepala BP Batam Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, sehingga hal ini diharapkan dapat mengurangi kendala pengelolaan pelabuhan di KPBPB Batam yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta bertujuan untuk mensinergikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan dan BP Batam dalam penyelenggaraan kepelabuhanan.

#### **B. Saran**

Langkah yang dapat ditempuh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BP Batam untuk tahun berikutnya meliputi:

1. Perlunya tata kelola SDM guna menunjang tugas dan fungsi tiap unit kerja di BP Batam;
2. Perlunya regulasi yang mengatur hubungan kerja antara BP Batam dan stakeholder lainnya agar dapat dapat bersinergi membangun ekonomi Batam;
3. Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada pelanggan.

Demikian Laporan Kinerja Badan Pengusahaan Batam Tahun 2017 yang telah disusun, dan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengusahaan Batam melalui upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

BATAM CENTRE, PULAU BATAM  
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048, FAKSIMILE (0778) 462240, 462456

**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
TAHUN ANGGARAN 2017**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tahun anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Batam, 26 Pebruari 2018  
Kepala SPI



  
Agung Prasetya Adi  
NIP.196002201982031002



KONTRAK KINERJA  
ANTARA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN



DENGAN

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

TAHUN 2017

Nomor : PRJ- 67 /PB/2017

Nomor : 339/SPJ/KA/2/2017

Dalam rangka mewujudkan tujuan Badan Layanan Umum yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Hatanto Reksodipoetro  
Jabatan : Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Marwanto Harjowiryono  
Jabatan : Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan RI  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bersepakat bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, ditetapkan kontrak kinerja dengan ketentuan:

1. PIHAK PERTAMA menyatakan kesanggupan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Investasi PMA pada kawasan perusahaan	Realisasi nilai investasi PMA	558.001.149 (US \$)
2.	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja yang Tinggi	Penyerapan Tenaga Kerja di 8 Fokus Industri	4.500 orang
3.	Penyusunan Laporan Keuangan yang Akuntabel	Opini Laporan Keuangan	WTP
4.	Pertumbuhan Pendapatan Layanan yang Signifikan	Tingkat Pertumbuhan PNB	20%
5.	Kepuasan masyarakat Pengguna Layanan yang Tinggi	Pencapaian kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan publik	≥ 4 (skala 1 – 5)
6.	Pengembangan Sistem Informasi BLU	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%

2. PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi atas capaian target kinerja tersebut.
3. PIHAK KEDUA akan melakukan rewiu dan evaluasi atas capaian kinerja dan dipergunakan sebagai pertimbangan pemberian remunerasi.

PIHAK KEDUA,

Jakarta, 22 Februari 2017

PIHAK PERTAMA,

Marwanto Harjowiryono  
NIP. 195906061983121001

Hatanto Reksodipoetro  
NUP. 1951022016042843

## MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

### Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

#### 1. Realisasi Investasi PMA

Sasaran Strategis	: Investasi PMA yang Mendukung Pembangunan Nasional
Indikator Kinerja Utama	: Realisasi Investasi PMA
Formula	: -
Satuan Pengukuran	: US \$
Jenis Konsolidasi Periode	: Take Last Known (Akumulasi Januari s.d Desember)
Polarisasi Indikator Kinerja	: Maximize (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	: Semester
Sumber Data	: Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

#### 2. Pertambahan Penyerapan Tenaga Kerja

Sasaran Strategis	: Penyerapan Tenaga Kerja yang Optimal
Indikator Kinerja Utama	: Pertambahan Penyerapan Tenaga Kerja
Formula	: -
Satuan Pengukuran	: Jumlah Orang
Jenis Konsolidasi Periode	: Take Last Known (Akumulasi Januari s.d Desember)
Polarisasi Indikator Kinerja	: Maximize (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	: Semester
Sumber Data	: Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/ Badan Pusat Statistik (BPS)

#### 3. Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Sasaran Strategis	: Laporan Keuangan Hasil Audit 2017
Indikator Kinerja Utama	: Opini Badan Pemeriksa Keuangan
Formula	: -
Satuan Pengukuran	: Opini
Jenis Konsolidasi Periode	: Take Last Known (Akumulasi Januari s.d Desember)
Polarisasi Indikator Kinerja	: Maximize (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	: Tahunan
Sumber Data	: Badan Pemeriksa Keuangan RI

Konversi opini hasil audit BPK kedalam persentase adalah sebagai berikut :

Opini	Persentase Penilaian
Wajar Tanpa Pengecualian	100

Wajar Dengan Pengecualian	75
Tidak Wajar	50
Tidak Memberikan Pendapat	25

#### 4. Pertumbuhan PNB

Sasaran Strategis	Pertumbuhan Penerimaan Negara
Indikator Kinerja Utama	Pertumbuhan PNB
Formula	$\frac{\left( \text{Realisasi PNB tahun bersangkutan} \right) - \left( \text{Realisasi PNB tahun sebelumnya} \right)}{\text{Realisasi PNB tahun sebelumnya}} \times 100\%$
Satuan Pengukuran	%
Jenis Konsolidasi Periode	Take Last Known (Akumulasi Januari s.d Desember)
Polarisasi Indikator Kinerja	Maximize (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	Semester
Sumber Data	Laporan Keuangan BP Batam

Catatan: target ditentukan sesuai perhitungan dengan menggunakan laporan keuangan *audited* 2017.

#### 5. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Sasaran Strategis	Kepuasan masyarakat yang Tinggi
Indikator Kinerja Utama	Tingkat Kepuasan Masyarakat
Formula	-
Satuan Pengukuran	Indeks
Jenis Konsolidasi Periode	Take Last Known (Akumulasi Januari s.d Desember)
Polarisasi Indikator Kinerja	Maximize (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	Tahunan
Sumber Data	Hasil Survey

Kepuasan masyarakat adalah angka yang diperoleh dari hasil survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengukuran IKM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Hasil survey dapat berupa:

Indeks Kuantitatif		Kualitatif	
Skala 1-5	Skala 1-100	Predikat	Predikat
1	1 - 20	Sangat Buruk	Sangat Tidak Memuaskan
2	21 - 40	Buruk	Tidak Memuaskan
3	41 - 70	Cukup	Cukup
4	71 - 90	Baik	Memuaskan
5	91 - 100	Sangat Baik	Sangat Memuaskan

#### 6. Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU

Sasaran Strategis	Pengembangan Sistem Informasi BLU
Indikator Kinerja Utama	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU

Formula

KPI ini bertujuan untuk mengukur tingkat modernisasi pengelolaan BLU dalam mendukung peningkatan layanan, akuntabilitas dan akurasi manajemen dalam pengambilan keputusan.

Modernisasi pengelolaan BLU dihitung dari persentase penyelesaian pengembangan sistem informasi pada tahun 2017 berdasarkan **kelengkapan tahapan** dan **kecepatan** penyelesaian tahapan serta terkoneksi dengan BIOS

Formula:

$$\text{Capaian KPI} = (\% \text{ Kelengkapan tahapan} \times \% \text{ bobot}) + (\% \text{ kecepatan penyelesaian} \times \% \text{ bobot})$$

Pencapaian kelengkapan berdasarkan urutan tahapan adalah sebagai berikut

Urutan Tahapan	Variabel	Capaian
1	Pengisian data profil, layanan dan keuangan pada BIOS secara lengkap	40%
2	Tersedianya <i>website</i> yang representatif dan <i>up to date</i>	20%
3	Terbentuknya <i>database</i> terpusat	10%
4	Tersedianya <i>Webservices</i> untuk transfer data ke Kementerian Keuangan	30%
5	Tersedianya <i>dashboard</i> untuk kebutuhan manajerial	10%
6	Tersedianya proses bisnis terkait layanan dan keuangan yang berbasis teknologi yang terintegrasi	30%

\*\* Capaian merupakan capaian maksimal. Capaian untuk tahap 1 dan 4 adalah minimal sebesar 75%. Apabila capaian di tahap 1 atau 4 dibawah minimal maka capaian ditahap selanjutnya tidak dihitung

Pencapaian kecepatan adalah sebagai berikut

Periode penyelesaian	Urutan Tahapan yang diselesaikan	Capaian
Triwulan I	1 s.d. 6	60%
	1 s.d. 4	10%
Triwulan II	1 s.d. 6	30%
Triwulan III	1 s.d. 6	10%
Triwulan IV	1 s.d. 6	0%

Satuan Pengukuran

%

Jenis Konsolidasi Periode

*Take Last Known*: Penetapan capaian akan dilakukan setiap triwulan berdasarkan hasil penjumlahan kinerja pencapaian kelengkapan dan kecepatan penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU.

Polarisasi Indikator Kinerja

*Maximize* (semakin tinggi capaian semakin baik)

Periode Pelaporan

Triwulanan

Sumber Data

Data primer pengembangan Sistem Informasi BLU